

REFLEKSIVITAS RISIKO PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS BUDAYA TERKAIT RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA KE KALIMANTAN TIMUR

Argyo Demartoto¹, Akhmad Ramdhon²

¹Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret,
argyodemartoto_fisip@staff.uns.ac.id

²Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret,
wacana3000@gmail.com

ABSTRAK

Sektor pariwisata menyumbangkan devisa negara yang tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi pelaku wisata, namun berisiko mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) berperan penting dalam pengembangan potensi industri pariwisata di Kalimantan Timur. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji reflektivitas pelaku pariwisata terhadap risiko sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya dalam pengembangan ekowisata berbasis budaya dalam konteks rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dengan teori masyarakat risiko dari Beck. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan kajian literatur dengan menentukan kriteria inklusi dari pelaku pariwisata di obyek dan daya tarik wisata Jembatan Pulau Balang sebagai penghubung Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sumber data primer adalah tinjauan kritis dari artikel, berita, arsip, buku dan dokumen yang terkait dengan pengembangan ekowisata berbasis budaya khususnya destinasi wisata Jembatan Pulau Balang. Hasil kajian menunjukkan bahwa rencana pengembangan ekowisata berbasis budaya didukung potensi yang atraktif, pelaku pariwisata yang responsif, akomodasi yang memadai, amenitas wisata dan produk budaya masyarakat sekitar Jembatan Pulau Balang. Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku pariwisata tentang tata kelola ekowisata, keterlibatan masyarakat untuk pelestarian lingkungan dan budaya harus diperhatikan agar ekowisata yang berbudaya dan alami dapat berkelanjutan dan lestari.

Kata kunci: Risiko; Ekowisata; Jembatan Pulau Balang; Pelestarian Lingkungan dan Budaya.

1. PENDAHULUAN

Kalimantan Timur sebagai wilayah yang direncanakan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) memiliki wilayah daratan seluas 256.142 ha dan wilayah perairan laut seluas 68.189 ha. IKN berbatasan dengan berbagai daerah antara lain Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara di sebelah barat; Selat Makassar di sisi Timur serta Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara di sisi Utara. Di sisi Selatan IKN berbatasan dengan Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara; Teluk Balikpapan; Kecamatan

Balikpapan Barat; Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan. Dari total luas daratan, 56.180 ha luas wilayah direncanakan menjadi pusat ibu kota sedangkan 199.962 ha sebagai wilayah pengembangan (Pandit, 2019).

Pemindahan IKN tidak hanya sebatas mengoptimalkan perencanaan terkait pusat pemerintahan saja. Namun pemindahan IKN berpotensi industri yang dapat dikembangkan sehingga dapat menarik investasi swasta aktif yang dapat meningkatkan devisa negara serta mengurangi kemiskinan (Mawa dkk., 2018). Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi di Kota Jakarta untuk merumuskan strategi yang tepat dalam pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur. Pengembangan industri dan pariwisata menjadi strategi yang tepat dalam pemindahan ibu kota negara. Pembangunan pariwisata yang potensial mengarah pada pembentukan ekowisata berbasis sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya (Yulianti dkk., 2020). Potensi ekowisata di IKN baru seperti wisata pulau Kumala Samarinda, desa wisata Dayak Pampang, jembatan Mahakam, pantai Lamaru Balikpapan, jembatan Pulau Balang yang menjadi salah satu akses penghubung menuju IKN Nusantara cukup besar, karena dapat mengupayakan terbentuknya industri lokal baru terutama bagi masyarakat disekitarnya. Potensi pariwisata berbasis ekowisata membutuhkan kajian strategi yang tepat agar menghasilkan keuntungan sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya bagi masyarakat lokal (Mardika, 2019).

Pemindahan IKN menyebabkan risiko tersendiri bagi masyarakat di wilayah IKN baru. Risiko modernisasi dari proses industrialisasi menjadi tantangan bagi implementasi pembangunan pariwisata seperti permasalahan sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya. Karakteristik masyarakat baru atau yang baru terbentuk adalah modernitas refleksif. Artinya anggota masyarakat berisiko terhadap berbagai situasi dan kondisi ketidakpastian, ancaman dan lain-lain, namun dapat meminimalisir dampak atau risiko tersebut, sehingga mendapatkan kenyamanan, keamanan, perlindungan dan kesejahteraan (Beck dkk., 1992; Beck, 2002). Penelitian ini bertujuan mengkaji reflektivitas pelaku pariwisata terhadap risiko sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya dalam pengembangan ekowisata berbasis budaya dalam konteks rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dengan teori masyarakat risiko dari Beck.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur (Neuman, 2011). Sumber data primer berupa artikel jurnal terkait reflektivitas pelaku pariwisata terhadap risiko sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya dalam pengembangan ekowisata berbasis budaya dalam konteks rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Penelitian dilakukan dengan menentukan kriteria inklusi dari pelaku pada obyek ekowisata di sekitar Jembatan Pulau Balang sebagai penghubung Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kajian literatur dilakukan dengan sistematis terhadap hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini untuk menunjukkan kondisi mutakhir dari masalah yang dikaji (Creswell, 2003). Data dianalisis dengan teknik analisis isi dan teori masyarakat risiko dari Ulrich Beck (Berg & Howard, 2009).

3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI

Pemindahan IKN menjadi tantangan sekaligus kesempatan baru bagi penambahan destinasi pariwisata di Indonesia terutama di wilayah Kalimantan Timur. Hal ini menjadi

tantangan tersendiri karena selama ini pembangunan mengutamakan pertambangan, minyak dan batubara sehingga sektor pariwisata di Kalimantan Timur belum terlalu berkembang. Di sisi lain pemindahan IKN memberikan kesempatan bagi industri pariwisata di Indonesia berupa peningkatan prosentase kunjungan wisatawan sebesar 30% hingga 40% ke wilayah Kalimantan Timur. Sebelumnya prosentase wisatawan di Indonesia didominasi kunjungan ke wilayah Bali 40%, Jakarta 30%, Kepulauan Riau 20% serta 10% wilayah lainnya (Pandit, 2019). Untuk mencapai peningkatan prosentase kunjungan wisatawan, pemerintah dan pelaku usaha pariwisata lokal perlu berkolaborasi untuk merencanakan strategi pembangunan dan pengelolaan pariwisata di Kalimantan Timur.

Selama ini destinasi pariwisata di Kalimantan Timur belum dikelola dengan baik sehingga kontribusi pada sektor pariwisata Indonesia terbilang rendah. Padahal potensi-potensi wilayah ini cukup beragam antara lain kekayaan ikan lumba-lumba air tawar, orang hutan, ekowisata mangrove, hutan tropis, tanah gambut serta budaya suku asli seperti Dayak dan Melayu yang menarik bagi wisatawan (Budiarta, 2019; Sanjaya & Wibowo, 2019). Pemindahan IKN berdampak pada pendistribusian wisatawan terkait aksesibilitas yang mempengaruhi pola turisnya. Oleh karena itu pembangunan IKN harus diawali dengan pemetaan potensi-potensi tersebut di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya. Peta ini kemudian dapat menjadi produk berupa paket-paket wisata yang dapat dipromosikan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara (Widia, 2019).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia memiliki strategi untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Kalimantan Timur, untuk membangun destinasi pariwisata di Kalimantan Timur berbasis sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya masyarakat setempat. Pada tahap awal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melakukan pemetaan potensi wisata berbasis ekowisata di Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemetaan ini dilakukan setelah Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada 15 Februari 2022 sebagai aturan hukum terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

Pembangunan ekowisata berbasis sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya menjadi strategi pengembangan pariwisata yang tepat menghadapi pemindahan IKN (Zilfana, 2021). Ekowisata berorientasi pada kemungkinan para wisatawan untuk mengunjungi daerah terpencil dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah dan budaya di suatu daerah sehingga masyarakat lokal berperan penting di dalamnya. Pembangunan ekowisata harus meminimalkan dampak negatif sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya setempat dan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat dan nilai konservasi (Patasik dkk., 2020). Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan risiko sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya pada setiap destinasi wisata. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain jumlah pengunjung menyesuaikan daya dukung lingkungan dan sosial budaya masyarakat; pola wisata ramah lingkungan, budaya dan adat setempat, berorientasi pada peningkatan perekonomian masyarakat lokal serta mengoptimalkan peran aktif masyarakat lokal (Mutaqin dkk., 2021).

Pola ekowisata berbasis sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya perlu mengoptimalkan keterlibatan masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan usaha. Peran masyarakat lokal didasari oleh kapasitas pengetahuan tentang alam serta budaya yang berpotensi serta nilai jual sebagai daya tarik wisata. Ekowisata berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat lokal dalam pengelolaan kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola. Ekowisata berbasis masyarakat dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat dan mengurangi kemiskinan melalui penghasilan dari jasa-jasa wisata untuk turis seperti *fee* pemandu wisata, biaya transportasi, *homestay*; menjual oleh-oleh, menyajikan penampilan seni dan lain sebagainya. Konsep ini mampu

menumbuhkan jati diri dan rasa bangga bagi penduduk setempat dengan budaya yang mereka miliki (Demartoto dkk., 2009; Demartoto dkk., 2014).

Pola ekowisata berbasis sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya memerlukan kolaborasi bersama komunitas, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan organisasi non pemerintah sebagai sebuah kemitraan dengan peran dan keahlian masing-masing. Upaya yang dapat dilakukan antara lain pembentukan komunitas masyarakat dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat; pengelolaan kepemilikan destinasi pariwisata oleh masyarakat setempat seperti pembangunan *homestay*; *penyediaan* pemandu wisata oleh masyarakat setempat serta pengelolaan dan pemeliharaan destinasi wisata sebagai tanggungjawab masyarakat setempat termasuk dalam hal penentuan biaya bagi wisatawan. Pembangunan pariwisata harus berorientasi pada pengembangan konsep ekonomi yang ramah lingkungan dan berbasis budaya. Oleh karena itu peran para pelaku usaha lokal sangat penting dalam upaya pengembangan pariwisata sehingga membuka peluang usaha kerja bagi penduduk setempat termasuk pelaku usaha pemula (Demartoto dkk., 2014).

Jembatan Pulau Balang sebagai penghubung Kota Balikpapan dengan wilayah Penajam Paser Utara dapat menjadi ikon pariwisata di IKN baru terus melakukan penataan objek wisata sebagai strategi menghadapi pemindahan IKN. Wilayah di sekitar Jembatan Balang merupakan wilayah strategis untuk pengembangan ekowisata berbasis sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya (Wahyudin, 2022). Upaya yang dilakukan berupa pembangunan masyarakat dan infrastruktur sebagai pendukung terbentuknya ekowisata. Pemindahan IKN juga berdampak pada penambahan kuantitas penduduk sehingga kebutuhan pariwisata meningkat. Beberapa objek wisata yang sedang ditata antara lain Bukit Embun, Danau Banyu Bening, Danau Cinta Segitiga, Agrowisata Durian. Pembangunan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek bagi terbentuknya ekowisata (Hamdani, 2020).

Pembangunan ekowisata berisiko secara sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya bagi masyarakat lokal di wilayah IKN baru (Silalahi, 2019; Hasibuan & Aisa, 2020). Proses modernisasi yang membentuk industrialisasi pariwisata menimbulkan risiko tersendiri. Orientasi pada perubahan era modernitas memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Dampak negatif yang muncul seperti ketergantungan teknologi yang berakibat buruk pada pola interaksi sosial masyarakat lokal terkait pembangunan ekowisata. Selain itu polusi udara, bencana banjir akibat penebangan hutan dan galian tambang serta pencemaran lingkungan menjadi risiko sektor lingkungan industrialisasi kawasan IKN baru (Pandit, 2019). Interaksi budaya juga memungkinkan risiko memudarnya nilai budaya tradisi asli dari masyarakat setempat. Selain itu persaingan ekonomi yang tidak tepat memungkinkan ketimpangan sosial bagi masyarakat setempat selaku subyek ekowisata. Namun hal ini bukan menjadi risiko yang perlu dihindari melainkan harus dihadapi dengan strategi yang tepat.

Pemindahan IKN baru menjadi sebuah proses dalam kurun waktu yang lama sehingga dinamika risiko dan perubahan sosial terus terjadi. Pada tahap awal masyarakat akan mengalami modernitas awal sehingga memungkinkan terjadinya kesadaran terkait risiko-risiko yang muncul. Selanjutnya modernitas lanjut membawa masyarakat menghadapi ketidakpastian besar tersebut sehingga membawa mereka menemukan upaya untuk meminimalisir risiko melalui upaya memperoleh keamanan dan kepastian pada setiap kehidupan masyarakat. Modernitas lanjut membawa reflektivitas masyarakat setempat untuk terus memperkuat nilai sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya menghadapi pembangunan ekowisata yang berisiko. Oleh karena itu perlu strategi penguatan nilai budaya lokal pada masyarakat setempat melalui pendidikan dan pelatihan terkait ekowisata berbasis sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya (Sujana, 2019). Sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan dari risiko pembangunan ekowisata dan mampu terus bertahan dengan nilai-nilai masyarakat lokal dalam berperilaku pariwisata. Penguatan nilai budaya bagi masyarakat

setempat di wilayah IKN baru menjadi reflektivitas yang tepat bagi masyarakat menghadapi risiko pembangunan pariwisata dalam konteks pemindahan IKN.

4. KESIMPULAN

Pembangunan ekowisata sebagai respon pemindahan IKN ke Kalimantan Timur memberikan risiko sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya bagi masyarakat setempat. Diperlukan kolaborasi untuk mencapai ekowisata berbasis budaya lokal yang kuat sehingga mampu menghadapi risiko tersebut menjadi modernitas lanjut. Pemerintah, komunitas, masyarakat dan swasta perlu bekerja sama melakukan upaya pendidikan dan pelatihan bagi penguatan budaya lokal bagi masyarakat setempat. Sehingga risiko pembangunan ekowisata yang dihasilkan mampu berdampak bagi peningkatan devisa negara sebagai dampak positif pada bidang pariwisata.

REFERENSI

- Beck, Ulrich. 2002. *Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences* (Vol. 13). London; Sage Publications.
- Beck, Ulrich, Scott Lash dan Brian Wynne. 1992. *Risk society: Towards a New Modernity* (Vol. 17). London; Sage Publications.
- Berg, Bruce L. dan Lune Howard. 2009. *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*. Boston; Pearson.
- Budiarta, I W. 2019. "Eksistensi Bahasa Lokal Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur: Ancaman dan Strategi Pemertahanannya." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2(2-2):1-9.
- Creswell, John W. 2003. *Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Demartoto, Argyo., Rara Sugiarti, Trisni Utami, Widyanto dan R Kunto Adi. 2009. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Surakarta; UNS Press.
- Demartoto, Argyo., Robertus B. Soemanto, dan Nur Indah Ariyani. 2014. *Habitus Pengembangan Pariwisata: Konsep dan Aplikasi*. Surakarta; UNS Press.
- Hamdani, Rizkiana S. 2020. *Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia*. (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan 4(1):43-62).
- Hasibuan, Reni R. A., dan Siti Aisa. 2020. *Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota terhadap Ekonomi di Indonesia*. (At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam 5(1):183-203).
- Mardika, I M. 2019. *Warisan Budaya sebagai Ikon Pariwisata dalam Rangka Kalimantan Timur menjadi Ibukota Negara*. (Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 2(2-2):57-62).
- Mawa, Zuriatin, Eny Rochaida dan Muliati. 2018. *Kemiskinan di Ibukota Kalimantan Timur*. (Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM) 2(2)).

- Mutaqin, Dadang J., Muhajah B. Muslim, dan Nur H. Rahayu. 2021. *Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara*. (Bappenas Working Papers 4(1):13-29).
- Neuman, William L. 2011. *Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston; Pearson.
- Pandit, I G. S. 2019. *Dampak Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara serta Penyelesaian Sengketa Hukumnya*. (Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 2(2-2):15-21).
- Patasik, Selocus G., Futum Hubaib dan Sumarmi. 2021. *Persepsi Masyarakat tentang Eksistensi Local Wisdom terkait Pemindahan Ibu Kota ke Provinsi Kalimantan Timur*. (Administrasi Publik 1(2):1802-1823).
- Sanjaya, Arwin, dan Sarwo E. Wibowo. 2019. *Pengembangan Ekowisata Kawasan Konversi Hutan Mangrove Kalimantan Timur*. (RJABM (Research Journal of Accounting and Business Management) 3(1):132-151).
- Silalahi, Sahat A. F. 2019. *Dampak Ekonomi dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara*. (Info Singkat Pusat Penelitian Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Badan Keahlian DPR RI XI(16/II/Puslit/Agustus/2019)).
- Sujana, I N. 2019. *Penguatan Hak Penguasaan Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur sebagai Rencana Ibu Kota Negara*. (Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 2(2-2):49-57).
- Wahyudin, Yudi. 2022. *Analisis Desa/Kelurahan Pusat Pertumbuhan Wilayah Sekitar Calon Ibu Kota Negara Indonesia*. (Forum Ekonomi 24(1):195-203).
- Widia, I K. 2019. *Pemajuan Kebudayaan Dalam Rangka Menjadikan Kalimantan Timur sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia*. (Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 2(2-2):10-14).
- Yulianti, Nurmaya, Rizki Firmansyah dan Sri Sundari. 2020. *Analisis Potensi Sektor Unggulan Kota Balikpapan dalam Mempersiapkan Ibu Kota Baru dari Perspektif Ekonomi Pertahanan*. (Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan 8(1):1-13).
- Zilfana, Zilfana. 2021. *Analisis Strategi SWOT dalam Pengembangan Potensi Ekowisata di Kalimantan Timur*. (Aktual 6(2):11-20).